



ISSN:

E-ISSN:

HAMBATAN BIROKRASI DALAM MELAKSANAKAN TUGAS (STUDI PATOLOGI BIROKRASI PADA PEGAWAI KANTOR CAMAT TALO KECIL KABUPATEN SELUMA)

*Rijono*¹

*Sugeng Suharto*²

¹) *Magister Public Administration, Faculty of Social Science And Political Science,
University of Bengkulu*

²) *Magister Public Administration, Faculty of Social Science And Political Science,
University of Bengkulu*

¹ E-mail: rijono123@gmail.com ² E-mail: sugengsuharto@yahoo.com

ARTICLE HISTORY

Received: February 00, 00

Revised: March 00, 00

Accepted: March 00, 00

Available online: April 00, 00

KEYWORDS

*Bureaucratic Pathology, Camat Office
Employees*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Patologi Birokrasi Pada Pegawai Kantor Pusat Kecamatan Talo Kecil Seluma dilihat dari persepsi dan gaya manajerial aparatur dalam birokrasi, pengetahuan dan keterampilan aparatur pelaksana berbagai kegiatan operasional, tindakan para anggota birokrasi yang melanggar norma hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku, perilaku birokrasi yang disfungsi dan pandangan situasi internal dalam berbagai analisis dalam tata kelola lingkungan. Fenomena menarik untuk dicermati dan diangkat ke permukaan adalah masih adanya praktek-praktek penyalahgunaan wewenang dan tanggung jawab pada tingkat manajerial birokrasi sehingga indikasi ke arah paradigma baru pemerintahan dan etika pemerintahan dalam penilaian publik belum sesuai dengan amanat reformasi. Hasilnya terjadi masalah tidak menindaklanjuti pembuatan surat dari pegawai ke bawahannya. Selain memprioritaskan melayani pegawai negeri kepada keluarganya, pengetahuan dan keterampilan pegawai yang masih rendah ini terlihat bahwa masih ada pegawai yang menempuh pendidikan SMA/ sederajat, kepala pegawai juga kurang mampu mengoperasikan komputer, dalam pelaksanaan pekerjaan terjadi pungutan yang dilakukan karyawan kepada masyarakat dalam pembuatan kartu keluarga, akta kelahiran dan KTP, belum terdapatnya lemari untuk menyimpan arsip sehingga diletakkan di lantai dekat meja, membuat surat pengantar masyarakat harus menunggu lama, pegawai sering acuh tak acuh dalam melayani masyarakat, melalaikan tugas karena terlambat datang dan tidak mengikuti apel pagi dikarenakan sebelum ke kantor pegawai terlebih dahulu pergi ke kebun untuk menyadap karet dan saat istirahat pegawai pulang ke rumah untuk makan siang dengan berbagai alasan dan juga pegawai kantor pusat kecamatan Talo Kecil Seluma tidak menyadari permasalahan yang

This is an open access article under the
CC-BY-SA license



Doi: <https://doi.org/10.31186/JGOAP>.

Rijono

1

terjadi di wilayah kerja mereka seperti banjir dan kurangnya motivasi untuk melayani masyarakat semaksimal mungkin.

ABSTRACT

This study aims to determine the pathology of bureaucracy in the employees of the Head Office of the Talo Kecil Seluma sub-district seen from the perceptions and managerial style of the apparatus in the bureaucracy, the knowledge and skills of the apparatus implementing various operational activities, the actions of bureaucratic members who violate legal norms, prevailing laws and regulations, dysfunctional bureaucratic behavior and views of the internal situation in various analyzes in environmental governance. An interesting phenomenon to be observed and raised to the surface is that there are still practices of abuse of authority and responsibility at the level of the managerial bureaucracy so that indications of a new paradigm of governance and government ethics in public assessments are not in accordance with the mandate of reform. As a result, there was a problem of not following up on writing letters from employees to their subordinates. In addition to prioritizing serving civil servants to their families, the knowledge and skills of employees are still low, it can be seen that there are still employees who take high school education / equivalent, the head of employees is also less able to operate computers, in carrying out work there are levies made by employees to the community in making family cards, birth certificates and ID cards, there is no cupboard for storing archives so they are placed on the floor near the table, making community cover letters have to wait a long time, employees are often indifferent in serving the community, neglect their duties because they are late arriving and do not attend morning apples because before going to the office employees first go to the garden to tap rubber and during breaks the employees return home for lunch with various reasons and also employees of the Talo Kecil Seluma sub-district head office are not aware of the problems that occur in their work areas such as floods and lack of transportation. motivation to serve the community as much as possible.

PENDAHULUAN

Reformasi dalam amanatnya menegaskan bahwa hapus praktek korupsi, kolusi dan nepotisme sebagai konsekuensi dari tuntutan masyarakat dan tuntutan perubahan paradigma. Sektor publik dalam perubahan paradigma barunya telah menegaskan pula bentuk dan model birokrasi yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, transparan dan pengelolaan administrasi yang akuntabel, melalui perubahan sistem dan pemangkasan struktur birokrasi serta model administrasi dan pemerintahan yang baik (*good governance*). Fenomena menarik untuk dicermati dan diangkat kepermukaan adalah, masih adanya praktek-praktek penyalahgunaan wewenang dan tanggung jawab pada tingkat managerial birokrasi, sehingga indikasi ke arah paradigma baru pemerintahan dan etika pemerintahan dalam penilaian publik belum sesuai dengan amanat reformasi (Risman, 2008:23).

Sebelum reformasi bergulir, birokrasi seolah hanya menjadi mesin salah satu parpol yang segala tindakannya selalu membawa visi misi parpol tertentu yang memegang tampuk kekuasaan. Birokrasi tidak lagi independen dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pada era reformasi ini, banyak peluang bagi birokrasi untuk bersikap netral dan hanya menjalankan tugas administratif. Birokrasi sebagai satu lembaga yang melaksanakan kebijakan yang dibuat politisi, sudah

saatnya dibangun dengan menganut prinsip rasional dan efisien sehingga dengan prinsip ini, birokrasi dapat berkembang dan tampil profesional, terlepas dari berbagai permasalahan yang mewarnai birokrasi itu, harus diyakini bahwa untuk menjadikan birokrasi profesional itu tidak mudah, bagaimana ide ini harus dilakukan jika birokrasi tidak mereformasi dirinya untuk tampil, oleh karena itu birokrasi harus mampu mereformasi diri, menjadi sosok profesional dengan pelayanan prima dan berlaku sebagai abdi negara dan masyarakat (Ulum, 2008:3).

Birokrasi merupakan instrumen penting dalam masyarakat yang kehadirannya tak mungkin terelakkan. Untuk itu negara harus terlibat langsung dalam memproduksi barang dan jasa publik yang diperlukan oleh rakyatnya. Negara secara aktif terlibat dalam kehidupan sosial rakyatnya. Untuk itu negara membangun sistem administrasi yang bertujuan untuk melayani kepentingan rakyatnya yang disebut dengan istilah birokrasi (Ahmad, 2008:34).

Hambatan Birokrasi Dalam Melaksanakan Tugas (Studi Patologi Birokrasi Pada Pegawai Kantor Camat Talo Kecil Kabupaten Seluma) Menurut weber, proses semacam ini bukan menunjukkan objektivitas dari esensi birokrasi, dan bukan pula mampu menghasilkan suatu deskripsi yang benar dari konsep birokrasi secara keseluruhan, tetapi hanya sebagai

suatu konstruksi yang bisa menjawab suatu masalah tertentu pada kondisi waktu dan tempat tertentu (Miftah, 2005:98).

Berkenaan dengan upaya pelayanan dan mewujudkan kesejahteraan rakyat birokrasi publik memberikan adil yang relating besar. Semua yang terdapat dalam cakupan penyelenggaraan negara tidak terlepas dari konteks public services dan public affairs. Barang dan jasa publik hendaknya dapat dikelola secara efisien dan efektif. Sedangkan konsekuensi pengelolaan tersebut menjadi tanggung jawab birokrasi (Ahmad, 2008:37).

Kelemahan birokrasi tidak hanya pada tataran strukturnya yang rumit, namun juga memiliki kelemahan proses, approach dan kelemahan personel, oleh sebab itu orang sangat sulit memulai darimana dan oleh siapa pembenahan mesti dimulai, sebab ketika suatu elemen birokrasi atau unsur non pemerintahan melakukan pembenahan karena besarnya arus praktek yang berlangsung terus menerus, elemen pelaku pembenahan itu akan terdistorsi oleh kuatnya arus yang berjalan secara menyeluruh itu (Ulum, 2008:5).

Hal lain yang menjadi penghambat upaya mewujudkan birokrasi yang profesional adalah adanya penyakit dalam tubuh birokrasi yang disebut patologi birokrasi. Patologi birokrasi ini yang menyebabkan pandangan masyarakat negatif tentang birokrasi. Menurut Siagian (1995:55) patologi birokrasi dapat muncul karena persepsi dan gaya manajerial pejabat, kurangnya pengetahuan dan keterampilan, tindakan birokrat yang melanggar norma hukum, manifestasi perilaku birokrasi yang bersifat disfungsi, akibat situasi internal dalam berbagai instansi dalam lingkungan

pemerintahan. Patologi birokrasi ini harus dicermati untuk mewujudkan birokrasi profesional, jika hal ini terus berlangsung, akan tercipta kondisi pemerintahan yang buruk (bad reputation of bureaucracy).

Hasil observasi peneliti Kantor Camat Talo Kecil Kabupaten Seluma, terlihat budaya pegawai dalam melayani masyarakat yang berkunjung rendah, hal ini terlihat dari alur pelayanan yang berbelit-belit dan panjang serta lambat, sehingga masyarakat harus bolak balik untuk mendapatkan pelayanan. Selain itu observasi peneliti terlihat bahwa kotak saran untuk menampung keluhan masyarakat tidak berjalan secara efektif, hal ini menunjukkan bahwa adanya indikasi ketidakpedulian pegawai terhadap kritik dan saran dari masyarakat.

Hasil wawancara dengan salah satu masyarakat wilayah Kantor Camat Talo Kecil Kabupaten Seluma, mengatakan bahwa pada saat pagi hari pegawai Kantor Camat Talo Kecil Kabupaten Seluma belum banyak yang datang, sehingga dalam mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) harus menunggu petugasnya datang, sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi lambat.

Selain itu hasil wawancara dengan pegawai Kantor Camat Talo Kecil Kabupaten Seluma, mengatakan bahwa pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki pegawai tidak sesuai dengan tuntutan tugas yang yang diberikan, dimana tugas tersebut tidak sesuai dengan bidang ilmu yang dimiliki. Selain itu hasil observasi peneliti terlihat penataan arsip-arsip Kantor Camat Talo Kecil Kabupaten Seluma tidak tertata dengan baik, banyak pegawai yang melalaikan tugas dengan datang terlambat. Selain itu pegawai juga

tidak tanggap terhadap masyarakat yang datang membutuhkan pelayanan di kantor camat, sehingga masyarakat harus mengantri apabila membutuhkan pelayanan dari pegawai Kantor Camat Talo Kecil Kabupaten Seluma.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul Hambatan Birokrasi Dalam Melaksanakan Tugas (Studi Patologi Birokrasi Pada Pegawai Kantor Camat Talo Kecil Kabupaten Seluma).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara kuantifikasi lainnya (Suwandi, dkk 2008:34).

Untuk menentukan sasaran penelitian maka dibuat definisi konsep dan operasional pada variabel Hambatan Birokrasi Dalam Melaksanakan Tugas (Studi Patologi Birokrasi Pada Pegawai Kantor Camat Talo Kecil Kabupaten Seluma):

1. Hambatan Birokrasi: Penyakit yang timbul atau yang ada dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam suatu pekerjaan yang dilakukan seorang pegawai yang mempunyai peran dalam Kantor Camat Talo Kecil Kabupaten Seluma.

2. Hambatan Birokrasi Dalam Melaksanakan Tugas pada Kantor Camat Talo Kecil Kabupaten dilihat dari aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Persepsi dan gaya manajerial para pejabat di lingkungan birokrasi, dilihat dari penyalahgunaan wewenang dan jabatan,

penguburan masalah, menerima sogok atau suap, dan kredibilitas relatif rendah / nepotisme

- b. Pengetahuan dan keterampilan para petugas pelaksana berbagai kegiatan operasional dilihat dari pengetahuan yang tidak sesuai dengan tuntutan tugas yang diemban dan keterampilan yang tidak sesuai dengan tuntutan tugas yang diemban.
- c. Tindakan para anggota birokrasi yang melanggar norma-norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang digolongkan dalam melanggar tindakan hukum, dilihat dari korupsi dan tata buku yang tidak benar
- d. Perilaku para birokrasi yang bersifat disfungsional/negative, dilihat dari bertindak sewenang-wenang dan melalaikan tugas

Informan Penelitian

Informan dalam penelitian pegawai Kantor Camat Talo Kecil Kabupaten Seluma diambil sebanyak 9 orang yaitu: 1 orang Camat Talo Kecil, 1 Orang Sekretaris Kecamatan, 5 orang pegawai kantor Camat Talo kecil yang mewakili masing-masing seksi dan 2 orang masyarakat yang berkunjung ke Kantor Camat Talo Kecil sebagai subyek penelitian untuk dilakukan wawancara. Dalam hal ini informan tidak dipilih secara acak (probability sampling), melainkan dilakukan dengan menetapkan atau menunjuk secara langsung (purposive). Purposive memilih informan yang dianggap paham mengenai masalah yang terjadi pada Kantor Camat Talo Kecil Kabupaten Seluma.

Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer berupa data yang diperoleh atau dikumpulkan melalui kuesioner dan wawancara. Wawancara dilakukan dengan tujuan untuk melengkapi kuesioner. sedangkan data sekunder berupa hasil observasi (dokumentasi penelitian) dari Kantor Camat Talo Kecil Kabupaten Seluma yang berkaitan dengan penelitian. Instrument Dalam penelitian ini menggunakan kuesioner dan in deft interview (pedoman wawancara).

Pengolahan Data dan Analisis Data

Analisis kualitatif: aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh, sebagai berikut: (Miler dan Huberman dalam Sugiyono 2008:44).

Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan Triangulasi Sumber dan Teknik (Sugiono, 2008:47).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Persepsi dan gaya manajerial para pejabat di lingkungan birokrasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terjadinya penyalagunaan wewenang oleh pegawai dan terjadi pengaburan masalah oleh pegawai dalam pembuatan surat yang tidak tindaklanjuti oleh bawahan dan dalam melayani masyarakat pegawai mendahulukan keluarganya. Selain itu juga menunjukkan bahwa terjadi sogok atau suap, hal ini dikarenakan masyarakat diminta sejumlah uang oleh pegawai dalam mengurus kartu keluarga

di kantor camat dan kredibilitas pegawai masih kurang dalam melaksanakan tugas.

Pengetahuan dan keterampilan para petugas pelaksana berbagai kegiatan operasional

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan pegawai masih rendah ini dilihat pegawai yang masih ada berpendidikan SLTA dan masih rendahnya keterampilan pegawai dalam mengoperasikan komputer, sehingga saat minta pengantar pegawai lambat menunggu sampai 1 jam setiap ada urusan.

Tindakan para anggota birokrasi yang melanggar norma-norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan tidak terjadi pungutan yang dilakukan oleh pegawai pada masyarakat dalam pembuatan pengantar Kartu Keluarga, Akte Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk. Selain itu penataan buku-buku atau arsip-arsip di kantor camat ini kurang teratur dikarenakan berkas-berkas belum punya lemari untuk penyimpanan arsip arsip kecamatan, sehingga diletakkan di lantai dekat meja dan kalau mengurus surat pengantar masyarakat harus menunggu lama kecuali masyarakat member uang kepada pegawainya.

Perilaku para birokrasi yang bersifat disfungsional/negatif

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terjadi tindakan sewenang-wenangan, karena pegawai bekerja sesuai dengan tupoksi dan pegawai sering melalaikan tugas dikarenakan mereka sering terlambat dan tidak apel pagi dikarenakan pegawai pergi ke kebun

terlebih dahulu untuk menyadap karet dan pulang siang dengan alasan makan siang.

Situasi internal dalam berbagai analisis dalam lingkungan pemerintahan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pegawai sudah bekerja dengan tupoksi dan untuk mendukung organisasi dan pegawai tidak tanggap terhadap permasalahan yang terjadi diwilayah kerjanya seperti kejadian banjir dan motivasi pegawai sangat kurang untuk melayani masyarakat sebaik mungkin. Selain itu motivasi kerja pegawai masih kurang, hal ini dikarenakan pegawai masih sering datang terlambat serta beban kerja pegawai tidak terlalu banyak, namun masih ada pekerjaan pegawai kantor camat tidak tepat waktu.

Patologi birokrasi bisa juga diartikan sama dengan “penyakit birokrasi”. Peran birokrasi sebagai implementor dari kebijakan politik, atau dengan kata lain birokrasi sebagai penyelenggara pemerintahan, maka patologi birokrasi dapat diartikan sebagai persoalan atau permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan akibat kinerja birokrasi tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan publik dengan baik. Patologi birokrasi dapat saja terwujud dalam ketidakmampuan pejabat politik di eksekutif (terpilih karena mandat politik) atau persoalan kinerja pejabat publik yang terpilih, yakni pejabat di birokrasi yang menduduki jabatan akibat proses politik atau karena kinerja pemimpin administratif, yakni birokrat karir yang menduduki jabatan karir di birokrasi. Atau birokrasi itu sendiri secara institusi, atau para agen pemerintah atau para birokrat yang tidak mampu memberikan kepuasan publik (Andrias, 2012:1).

Menurut Siagian (1995:69) beberapa patologi birokrasi yang dapat dijumpai, antara lain: Penyalahgunaan wewenang dan tanggung jawab, pengaburan masalah, indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme, indikasi mempertahankan status quo, empire bulding (membina kerajaan), ketakutan pada perubahan, inovasi dan resiko, ketidakpedulian pada kritik dan saran, takut mengambil keputusan, kurangnya kreativitas dan eksperimentasi, kredibilitas yang rendah, dan kurang visi yang imajinatif serta minimnya pengetahuan dan keterampilan.

Sementara itu Schoorl (1984:223) faktor penyebab terjadinya patologi birokrasi, sebagai berikut: Kekurangan Administrator yang cakap, besarnya jumlah aparat birokrasi, luasnya tugas pemerintahan, anasir tradisional (nepotisme, patrimonial, hirarkis), dan sentralisasi dan besarnya kekuasaan birokrasi. Menurut Miftah, (2005:101) faktor penyebab terjadinya patologi birokrasi, sebagai berikut: Lemahnya faktor moral, gaji rendah, sistem rekrutmen dan promosi tidak baik, aturan dan mekanisme kerja belum jelas, birokrasi berpotensi politis, dan lemahnya pengawasan.

Penelitian Wahyono (1997:131) dengan judul Patologi Birokrasi Pendidikan Guru. Penelitian ini berhasil mengidentifikasi 4 penyakit birokrasi pendidikan yang berhubungan dengan problem pengembangan profesionalisme guru SD yaitu rigiditas pelayanan, korupsi pelayanan, formalisme aktivitas birokrasi pendidikan, dan sikap instruktif aparat. Meminjam terminologi ilmu kesehatan manusia, keempat penyakit yang diidap birokrasi pendidikan tersebut berada pada tingkat akut dan bahkan dapat dikatakan

kronis. Birokrasi pendidikan yang bermuatan patologis tersebut, ternyata mempunyai hubungan yang signifikan terhadap rendahnya profesionalisme guru SD dalam aktivitas mengajar. Gejalanya tampak pada tiadanya otonomi guru dalam profesinya sebagai pengajar, rendahnya motivasi berkompetisi di kalangan guru, dan rendahnya kreativitas serta motivasi berinovasi guru dalam aktivitas mengajar. Efektifnya pengendalian birokrasi menyebabkan posisi guru praktis hanya sebagai obyek baik secara administratif maupun ekonomi. Ada semacam proses di mana guru SD ditempatkan berada di luar jajaran birokrasi, meskipun guru merupakan bagian dari birokrasi itu sendiri. Dengan posisi ini, komunitas guru SD terus dijadikan obyek eksploitasi ekonomi oleh birokrasi pendidikan, yang manifestasinya bisa berupa penyelenggaraan kegiatan pemotongan gaji. Situasi ini berlangsung terus-menerus, sehingga di satu sisi semakin menyebabkan parahnya penyakit birokrasi, sementara pada sisi lain komunitas guru SD terus menanggung beban dari dampak negatif pengaturan birokrasi pendidikan yang mengidap patologi tersebut.

Selama kedudukan dominan berada di tangan birokrat, maka tidak menutup kemungkinan terjadinya kolusi atau penyalahgunaan wewenang untuk setiap urusan. Birokrasi pemerintahan yang semakin kuat dan cenderung melakukan penyalahgunaan jabatan, wewenang, dan kekuasaan. Selama kekuasaan legislatif dan yudikatif berada dibawah penguasa sebab peran kepala eksekutif sangat mempengaruhi kedudukan, jabatan, dan posisi di kedua

lembaga tersebut. Lembaga legislatif tidak dapat melakukan fungsi pengawasan secara efektif karena eksekutif lebih kuat daripada legislatif sedangkan lembaga yudikatif tidak kuat dan tidak independen karena adanya campur tangan dari kepala eksekutif (Siahaan, 1998:44).

Menurut Akhmad Setiawan, birokrasi di Indonesia tergolong birokrasi yang tidak bebas berpolitik (Akhmad, 1998:55). Hal ini tercermin dalam birokrasi yang sulit untuk tidak terlibat politik sementara ciri patrimonial masih melekat. Hal inilah yang menjadikan keikutsertaan masyarakat dalam pengambilan keputusan menjadi lebih terlihat. Birokrasi pemerintahan yang ideal tercipta ketika karakter birokrasi ideal terpenuhi, yaitu birokrasi yang terstruktur baik, tidak adanya jabatan yang inefisien, aturan yang jelas, personel yang cakap, birokrasi yang apolitis, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

PENUTUP

Persepsi dan gaya manajerial para pejabat di lingkungan birokrasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh pegawai dan terjadi pengaburan masalah oleh pegawai dalam pembuatan surat yang tidak tindaklanjuti oleh bawahan dan dalam melayani masyarakat pegawai mendahulukan keluarganya. Selain itu juga menunjukkan bahwa terjadi sogok atau suap, hal ini dikarenakan masyarakat diminta sejumlah uang oleh pegawai dalam mengurus kartu keluarga di kantor camat dan kredibilitas pegawai masih kurang dalam melaksanakan tugas.

Pengetahuan dan keterampilan para petugas pelaksana berbagai kegiatan operasional

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan pegawai masih rendah ini dilihat pegawai yang masih ada berpendidikan SLTA dan masih rendahnya keterampilan pegawai dalam mengoperasikan komputer, sehingga saat minta pengantar pegawai lambat menunggu sampai 1 jam setiap ada urusan.

Tindakan para anggota birokrasi yang melanggar norma-norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan tidak terjadi pungutan yang dilakukan oleh pegawai pada masyarakat dalam pembuatan pengantar Kartu Keluarga, Akte Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk. Selain itu penataan buku-buku atau arsip-arsip di kantor camat ini kurang teratur dikarenakan berkas-berkas belum punya lemari untuk penyimpanan arsip-arsip kecamatan, sehingga diletakkan di lantai dekat meja dan kalau mengurus surat pengantar masyarakat harus menunggu lama kecuali masyarakat member uang kepada pegawainya.

Perilaku para birokrasi yang bersifat disfungsional/negatif

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terjadi tindakan sewenang-wenang, karena pegawai bekerja sesuai dengan tupoksi dan pegawai sering melalaikan tugas dikarenakan mereka sering terlambat dan tidak apel pagi dikarenakan pegawai pergi ke kebun terlebih dahulu untuk menyadap karet dan pulang siang dengan alasan makan siang.

Situasi internal dalam berbagai analisis dalam lingkungan pemerintahan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pegawai sudah bekerja dengan tupoksi dan untuk mendukung organisasi dan pegawai tidak tanggap terhadap permasalahan yang terjadi di wilayah kerjanya seperti kejadian banjir dan motivasi pegawai sangat kurang untuk melayani masyarakat sebaik mungkin. Selain itu motivasi kerja pegawai masih kurang, hal ini dikarenakan pegawai masih sering datang terlambat serta beban kerja pegawai tidak terlalu banyak, namun masih ada pekerjaan pegawai kantor camat tidak tepat waktu.

SARAN

Kepada pegawai kantor Camat Talo Kecil Kabupaten Seluma hendaknya dapat bekerja lebih disiplin dalam melaksanakan tugas-tugasnya di kantor. Selain itu pegawai hendaknya dapat kursus mengoperasikan computer, sehingga dapat lebih mudah mengerjakan tugas-tugas di kantor yang berhubungan dengan komputer.

Kepada Camat Talo Kecil Kabupaten Seluma dapat memberikan pengawasan lebih intensif kepada pegawainya yang tidak disiplin dan tidak mematuhi aturan dalam melaksanakan pekerjaan. Selain itu Camat Talo Kecil Kabupaten Seluma hendaknya dapat mengajukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma untuk pengadaan lemari arsip penyimpanan berkas-berkas.

REFERENSI

Setiawan. Akhmad. 1998. *Etos Birokrasi dalam Bayang-Bayang Kultural*, Harian Kompas, 24 Mei 1998 dalam Indra Pahlevi, *Birokrasi dan Perubahan Sosial Politik*, cet Kesatu Jakarta: Pusat

Pengkajian dan Pelayanan Informasi
SekJen DPR-RI.

Rasyid, M. Ryaas. 1998. *Birokrasi dan Perubahan Sosial Politik*. Cet Kesatu Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi SekJen DPR-RI.

Thoah, Miftah. 2005. *Birokrasi dan Politik di Indonesia*, Cet Kesatu. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Risman, Kudrat, Umar. 2003. *Perubahan Patologi Birokrasi ke Etika Pemerintahan Melalui Prinsip Good Governance*. Jakarta. ; Ghalia Indonesia.

Siahaan Uli Sintong, 2003. *Birokrasi dan Perubahan Sosial Politik*. cet Kesatu Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi SekJen DPR-RI.

Siagian, Sondang P. 1995. *Patologi Birokrasi Analisis Identifikasi dan terapinya*. Jakarta; Ghalia Indonesia.

Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Administrasi*. edisi ke-12. Bandung. Alfabeta.